

# **ANALISIS KONDISI OPOSISI PASCA PEMILU 2019 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DEMOKRASI INDONESIA**

**Insan Harapan Harahap**

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie  
Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta Selatan, Indonesia  
insan.harahap@bakrie.ac.id

## **Abstract**

This study aims to present an analysis of the conditions of the opposition in Indonesia after the 2019 election, where the condition of the opposition after the presidential election became unbalanced as several opposition parties joined the government camp since the Working Indonesia Coalition was declared the winner. The existence of an imbalance in the number of opposition makes the value of democracy in Indonesia unstable due to the reduced number of critics who will judge the work of the government during their tenure. In addition, the potential imbalance in the process of checks and balances in the distribution of power in the distribution of government power, and the decline in the quality of democracy in Indonesia. Thus this study will explain the current condition of the opposition in Indonesia by comparing the reality conditions with the ideal conditions of democracy and an estimate of how the impact of the maneuvers carried out by various political parties will affect the quality of democracy in Indonesia. The importance of the position of the opposition in the value of democracy makes an important problem that needs attention.

Keywords: opposition, democracy, trias politica, election

## **Abstrak**

Kajian ini bertujuan untuk memaparkan analisis kondisi oposisi di Indonesia pasca pemilu 2019 lalu, dimana kondisi oposisi pasca pemilu presiden menjadi tidak seimbang seiring bergabungnya beberapa partai oposisi dalam kubu pemerintah sejak kubu Koalisi Indonesia Kerja dinyatakan sebagai pemenang. Adanya ketidak seimbangan jumlah oposisi membuat nilai demokrasi di Indonesia menjadi tidak stabil dikarenakan berkurangnya jumlah pengkritik yang akan menilai kerja pemerintahan selama menjabat. Selain itu potensi ketidakseimbangan dalam proses *check and balances* dalam pembagian kekuasaan dalam pembagian kekuasaan pemerintah, dan menurunnya kualitas dari demokrasi di negara ini. Dengan demikian dalam kajian ini akan dijelaskan mengenai kondisi terkini dari pihak oposisi di Indonesia dengan membandingkan kondisi realita dengan kondisi ideal demokrasi dan perkiraan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari maneuver-maneuver yang dilakukan berbagai partai politik yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Pentingnya kedudukan oposisi dalam nilai Demokrasi menjadikan problematika penting yang perlu diperhatikan.

Kata Kunci: oposisi, demokrasi, trias politika, pemilu

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui, dalam demokrasi perlunya pihak di luar pemerintah untuk menjadi penyeimbang dari berjalanya pemerintahan, agar tidak terjadinya kekuasaan berlebih yang dipegang oleh satu pihak. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, menyelenggarakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali sebagai salah satu syarat berjalannya demokrasi di Indonesia. Dalam proses menjalankan pemerintahan, Indonesia mengalami berbagai dinamika politik yang terkait dengan sikap partai-partai peserta Pemilu. Berbagai sikap politik telah dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu tersebut. Namun sikap yang terlihat sangat kontras ditampilkan pasca pemilu, tepatnya setelah diumumkan hasilnya.

Partai-partai telah menentukan sikap dan posisinya setelah mengetahui hasil dari Pemilu tersebut. Diantara berbagai sikap tersebut bergabungnya pihak yang kalah ke dalam Koalisi Pemerintahan dan pihak yang menyatakan sikapnya untuk tetap beroposisilah yang menjadi sorotan utama. Dalam kejadian ini bergabungnya pihak-pihak yang kalah ke dalam Koalisi Pemerintah menunjukkan sangat pragmatisnya sikap partai dalam menghadapi dinamika perpolitikan.

Pada Pemilu 2019 ini, terdapat dua kubu besar yang memperebutkan posisi eksekutif di Indonesia. Kedua kubu itu adalah Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon eksekutif, dan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai calon eksekutif.<sup>1</sup> Koalisi ini tergabung dari beberapa partai, untuk Koalisi Indonesia Kerja terdiri dari PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura sebagai partai pengusung dan dengan partai pendukung Perindo, PSI, dan PKP.<sup>2</sup> Sementara itu Koalisi Indonesia Adil Makmur terdiri dari Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS sebagai partai pengusung dan Partai Berkarya sebagai pendukung.<sup>3</sup>

Semakin mendekati hari berlangsungnya Pemilu, pertarungan kian memanas antara pendukung kedua kubu. Berbagai pertunjukan perpolitikan yang ditampilkan menunjukkan seberapa seriusnya kedua kubu untuk memenangkan Pemilu ini. Persaingan dalam menunjukkan siapa yang lebih layak juga ditunjukkan oleh kedua kubu. Bahkan dalam beberapa hal kedua kubu saling menampilkan keburukan dari lawannya. Terlihat agak mengkhawatirkan pada awalnya. Namun, beginilah seharusnya demokrasi berjalan.

Setelah melewati persaingan ketat dan panjang, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Indonesia telah selesai diselenggarakan. Dengan hasil yang telah ditetapkan bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk lima tahun ke depan, hal ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan hasil keunggulan raihan suara Jokowi-Ma'ruf sejumlah 55,50% dari total suara sah di Pilpres 2019, sedangkan Prabowo-Sandiaga meraih 44,50% dari total suara sah.<sup>4</sup>

Sedangkan pada posisi legislatif rekapitulasi hasil pemilu menetapkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dengan menorehkan hasil 19,33% suara dan mendapat jatah 128 kursi di DPR, diikuti oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan mendapat jatah 85 kursi di DPR, sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendapat 78 kursi di DPR.<sup>5</sup> Hal ini tentunya tidak menguntungkan bagi kubu Gerindra mengingat hanya memperoleh peringkat ketiga pendapatan kursi di DPR dan kandidat yang telah dimajukan dalam pemilihan presiden mengalami kekalahan.

Melihat tingginya persaingan rivalitas dari kedua kubu, bahkan setelah ditampilkannya hasil sementara melalui situs KPU rivalitas dari kedua kubu pun belum menurun. Dan hingga diumumkannya hasil Pemilu, berbagai respon dari pendukung pihak Koalisi Adil Makmur sangat beragam. Mulai dari adanya tuduhan kecurangan dan aksi melemahnya kondisi internal Koalisi Adil Makmur.

---

<sup>1</sup> Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/10250341/ini-urutan-penghitungan-suara-pada-pemilu-serentak-2019>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> CNN Indonesia, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>

<sup>5</sup> Ayomi Amindoni, BBC News Indonesia, Kabinet Jokowi: 'Koalisi Gemuk' Setelah Prabowo Subianto Merapat Ke Pemerintah, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592>

Kemenangan Koalisi Indonesia Kerja, pada pemilu yang baru dilaksanakan pada tahun 2019 ini tidak dapat dipungkiri karena upaya yang dilakukan oleh pihak oposisi tidak dapat dibuktikan secara hukum dan pihak oposisi pun harus menerima kenyataan atas kekalahan yang terjadi. Setelah kekalahan yang dialami oleh pihak oposisi, kekuatan yang ada di dalam oposisi pun mulai terpecah di karenakan adanya beberapa partai yang terdapat di dalam oposisi mulai merapat ke dalam barisan koalisi yang diawali merapatnya Partai Demokrat yang di ketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono ke dalam Koalisi Indonesia Kerja, merapatnya partai Demokrat ini ditandai dengan beberapa kali diadakannya pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Jokowi melaksanakan pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Istana Merdeka untuk membahas merapatnya Partai Demokrat ke dalam koalisi.<sup>6</sup>

Setelah bertemunya Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi berselang, tibalah waktunya Prabowo selaku Ketua Partai Gerindra yang bertemu dengan Presiden Jokowi. Usai pertemuan ini berlangsung pada 11 Oktober 2019, Jokowi menyatakan bahwa pertemuan itu membahas kemungkinan Partai Gerindra untuk bergabung dengan Koalisi Pemerintah terpilih.<sup>7</sup> Indikasi bergabungnya Partai Gerindra dengan Koalisi pemerintah diperkuat dengan adanya pernyataan dari Prabowo yang menyatakan bahwa bersedia untuk membantu Pemerintah bila diperlukan, walaupun tidak dapat bergabung ia akan tetap membantu dari luar Pemerintah.<sup>8</sup>

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berbagai sinyal ataupun tanda-tanda yang diberikan partai-partai jelang pelantikan Presiden pun telah terbukti dengan dilantikannya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi. Masuknya Gerindra ke dalam Koalisi Pemerintah menjadi indikasi tersendiri bagi kondisi demokrasi di Indonesia. Dengan besarnya pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh Gerindra, hal ini menyebabkan kekuatan pemerintah semakin besar. Hal ini menjadi indikasi lain bagi pihak oposisi dengan demikian dapat dilihat secara jelas bahwa perbedaan kekuatan antara kubu pemerintah dan oposisi yang sangat besar.

Berkurangnya anggota dalam kubu oposisi membuat semakin melemahnya kubu oposisi saat ini, hal ini akan menjadi salah satu potensi buruk karena menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam proses *check and balances* dalam pembagian kekuasaan pemerintah, dan menurunnya kualitas dari demokrasi di Indonesia. Dengan demikian dalam paper ini akan dijelaskan mengenai kondisi terkini dari pihak oposisi di Indonesia dengan membandingkan kondisi realita dengan kondisi ideal demokrasi dan perkiraan bagaimana kedepannya dampak yang ditimbulkan dari maneuver-manuver yang dilakukan berbagai partai politik yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Demokrasi

Demokrasi memiliki arti pemerintahan oleh rakyat, hal ini semula berasal dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat yang memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Sedangkan dilihat menurut etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yaitu “demos” berarti rakyat, dan “cratos” yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi menurut bahasanya *democratos* (demokrasi) adalah Negara yang dalam sistem

---

<sup>6</sup> Ihsannudin, Kompas.com, "SBY Temui Presiden Jokowi di Istana", diakses melalui:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/14134601/sby-temui-presiden-jokowi-di-istana>

<sup>7</sup> TEMPO.CO, Sinyal Gerindra-Demokrat ke Jokowi Kian Terang Jelang Pelantikan, diakses melalui:

<https://nasional.tempo.co/read/1258797/sinyal-gerindra-demokrat-ke-jokowi-kian-terang-jelang-pelantikan/full&view=ok>

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986, hlm. 134

pemerintahannya meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berdasarkan keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat, rakyat berkuasa, dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>10</sup>

Sebuah pemerintahan dalam suatu negara menjalankan berbagai fungsi yang sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus, dengan mengatas namakan kepentingan rakyat. Hal itulah yang nantinya akan menjadi hambatan untuk mencapai pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika pemerintahan memegang kuasa yang absolut dalam beberapa hal, misalnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, membuat peraturan perundang-undangan, atau menjalankan peradilan, maka semakin besar juga kesempatan bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal itu akan menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan memunculkan ketidakadilan yang akan diterima masyarakat. Karena itulah, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mengenai teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dasar dari pemikiran ini tentunya untuk menghindari pemusatan kekuasaan pemerintahan yang memiliki potensi menghasilkan kesewenang-wenangan, sehingga hal tersebut mengenyampingkan rakyat sebagai pihak yang seharusnya diutamakan dan sebagai pemegang kedaulatan.

Pada prinsipnya, konstitusi suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) dalam rangka pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan dilihat dari fungsinya menunjukkan perbedaan yang dimiliki antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.<sup>11</sup>

Trias Politika adalah suatu prinsip dimana pembagian kekuasaan negara terbagi menjadi atas tiga macam kekuasaan: Pertama, legislatif atau kekuasaan dalam membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan dalam pelaksanaan undang-undang; ketiga yaitu kekuasaan yudikatif atau kekuasaan dalam mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diberikan kepada pihak yang sama, hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemegang kekuasaan.<sup>12</sup> Dengan demikian hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.<sup>13</sup>

## 2.2 Oposisi dalam Demokrasi

Sehubungan dengan kedaulatan rakyat dan pembagian kekuasaan tersebut, oposisi memiliki relevansinya. Hal ini terkait dengan tidak ada kepastian jika kedaulatan dan kepentingan rakyat dapat seluruhnya tertampung dan direalisasikan seutuhnya oleh pemerintah. Sejarah memperlihatkan bahwa terjadinya pemerintahan yang mengatas namakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru memudahkan esensi dari kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan di luar pemerintahan yang mampu untuk menjaga kedaulatan rakyat itu tetap berfungsi dengan semestinya.<sup>14</sup> Dalam konteks inilah peran pihak di luar pemerintahan atau oposisi menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan bahwa pemerintahan yang dijalankan tetap berada dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.<sup>15</sup> Dengan kata lain, eksistensi oposisi terkait erat dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 110.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, 1995, Mandar Maju, Bandung, hlm. 78-79

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, 2003, hlm. 2-3

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> 321.8 Firman Noor, *Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016, hlm. 3

<sup>15</sup> *Ibid*

Oposisi merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam berbagai aspek. Oposisi dalam makna secara umum sering diartikan sebagai “berseberangan” atau “sesuatu yang posisinya tidak sama dengan yang lain”.<sup>16</sup> Dalam konteks politik, beberapa pihak mengartikan oposisi sebagai suatu bentuk informal dari kontestasi di antara lembaga-lembaga pemangku kekuasaan, sementara itu keberadaan dari oposisi politik adalah bentuk kontestasi yang diakui dan dijamin dalam konstitusi.<sup>17</sup>

Oposisi dalam konteks berdemokrasi adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu fondasi, selain partisipasi, dari yang dianggap sebagai poliarki atau suatu bentuk pemerintahan yang demokrasi. Dalam konteks politik, dan lebih khusus dalam kehidupan demokrasi, oposisi memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.<sup>18</sup> Hal ini memiliki makna oposisi sebagai penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan dari luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap yang berbeda dan menimbulkan keseimbangan agar arah kebijakan pemerintah tidak menjauh dari kepentingan mayoritas rakyat. Makna utama penyeimbang ini mengingat ada kalanya pemerintah yang terpilih secara demokratis akhirnya jatuh menjadi pemerintahan yang melawan kehendak rakyat.

Kedua, fungsi penting oposisi adalah memastikan agar alternatif pikiran atau kebijakan dapat disuarakan.<sup>19</sup> Oposisi akan memungkinkan tersedianya lebih banyak opsi kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan yang dibuat pemerintah.<sup>20</sup> Hal ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak memiliki kekurangan atau kesalahan. Pemerintahan yang dipimpin oleh pihak terbaik sekalipun tetap membutuhkan dukungan dari kelompok oposisi untuk dapat lebih menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat. Oposisi yang tidak aktif, adalah keterbatasan opsi bagi tegaknya aspirasi rakyat.<sup>21</sup> Dan apabila hal tersebut berjalan dalam waktu lama, dapat memunculkan pembusukan demokrasi sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada era Orde Baru. Dengan kata lain, oposisi dibutuhkan agar kebijakan yang lebih komprehensif dapat tercipta dan terjadinya kesalahan dapat diminimalkan.

Ketiga, fungsi penting oposisi lainnya adalah menjadi stimulus persaingan yang sehat bagi para elite politik dan pemerintahan.<sup>22</sup> Sama halnya dengan persaingan lainnya, suatu pemerintahan akan mengalami stagnasi atau tidak berkembang, bahkan kemunduran, apabila tidak memiliki rival atau tantangan dari pihak-pihak lain yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya pihak yang bisa membuat kebijakan-kebijakan lain yang lebih baik ketimbang kebijakan pemerintah. Adanya oposisi akan membuat kualitas pemerintah yang berkuasa lebih terjaga, dan menyadari ada pihak lain yang memiliki potensi untuk memberikan kebijakan yang lebih baik.<sup>23</sup> Karena itulah, oposisi diperlukan pemerintah sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra baiknya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, jelas bahwa eksistensi dan penguatan oposisi terkait dengan upaya membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari kekuasaan yang berlebih atau terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekedar posisi anti-pemerintah atau sekedar berbeda, melainkan sebuah keberadaan yang memberikan kritik dan tawaran sebagai alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>17</sup> Fredrick Barnard, *Between Opposition And Political Opposition, The Search Of Competitive Politics In Czechoslovakia*, Canadian Journal of Political Science, 1972, hlm. 533

<sup>18</sup> Robert Dahl, *Poliarchy: Participation And Opposition, 1971*, New Haven, CT, and London: Yale University Press.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana awalnya penulis menguraikan gambaran umum komposisi koalisi partai dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Pasca pemilu dilaksanakan, beberapa partai peserta pemilu yang menjadi oposisi, justru melakukan perubahan sikap setelah mengetahui atau mendapat indikasi bahwa pihak yang mereka dukung mengalami kekalahan.

Selanjutnya, penulis membahas dan menganalisis tentang bergabungnya partai besar dari kelompok oposisi ke dalam koalisi pemerintah serta manuver-manuver yang dilakukan berbagai partai politik yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dan informasi dari bahan pustaka, yang terdiri dari informasi dari website resmi yang terkait dengan pemilu 2019, hasil penelitian sebelumnya, buku, dan berita resmi.

### 4. PEMBAHASAN

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019–2024, ada hal menarik yang terjadi. Salah satunya adalah masuknya nama-nama petinggi partai oposisi yaitu Partai Gerindra ke dalam Kabinet Jokowi Jilid II. Dalam Kabinet Indonesia Maju ini, Partai Gerindra mendapatkan dua kursi.<sup>24</sup> Ketua Umum Gerindra (Prabowo Subianto) sebagai Menteri Pertahanan serta Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pernyataan dari Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi, I Made Leo Wiratama)<sup>25</sup> bahwa dengan bergabungnya Partai Gerindra ke Pemerintahan sangat merugikan, mengingat bahwa selama proses kampanye dan saat pemilihan umum sebelumnya, Partai Gerindra merupakan pihak oposisi dan pengkritik Pemerintah. Keputusan Gerindra bergabung dengan koalisi Pemerintah ini sangat menyita perhatian publik. Jika diingat kembali proses kampanye atau saat Jokowi masih mengemban amanah menjadi Presiden periode sebelumnya, kerap kali terjadi sentiman identitas, terutama keagamaan yang sering dieksploitasi. Sentimental ini menciptakan polarisasi politik di masyarakat. Sehingga publik pun terpecah ke dalam dua kelompok besar yang diakibatkan perbedaan dan afiliasi politik.

Dengan bergabungnya Partai Gerindra dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid II, akan menyebabkan Gerindra tidak dapat berbuat banyak untuk *check and balance* di Parlemen. Sebagai partai oposisi dari pemilihan umum periode sebelumnya, memungkinkan Gerindra kehilangan kesempatan untuk menikmati kekuasaan bahkan akses pada sejumlah proyek yang akan dianggarkan oleh Pemerintah. Dan untuk alasan inilah, yang mungkin menyebabkan Gerindra harus ikut bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Selain itu, seperti diketahui bahwa Parpol tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. Sumber pendanaan parpol yang dapat diandalkan ialah sumbangan individu, baik dari kader parpol yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislative ataupun dari pengusaha yang terafiliasi dengan partai politik tersebut.

Keberadaan dan perkembangan demokrasi di Indonesia belum sempurna karena masih memunculkan praktik politik yang mengurangi makna hakikat demokrasi. Kekuatan dari eksistensi oligarki atau elitisme menunjukkan dengan jelas bahwa fenomena pelaksanaan kekuasaan (*power exercise*) hingga saat ini masih minim kontrol karena kekuatan penyeimbang yang notabene melekat pada kelompok oposisi dimana hal ini perlu lebih diperhatikan dan

---

<sup>24</sup> 'Menteri kabinet Jokowi jilid II', <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023102611-4-109306/sah-ini-menteri-kabinet-jokowi-jilid-ii-kuy-intip-profilnya/2>

<sup>25</sup> 'bergabungnya gerindra ke pemerintah merupakan kerugian besar', <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/14/bergabungnya-gerindra-ke-pemerintah-merupakan-kerugian-besar>

secara fundamental merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak, setidaknya untuk mengurangi praktik oligarki dengan segenap aspek buruk yang lahir dari hal tersebut. Kebutuhan keberadaan oposisi sering dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam tatanan konseptual memiliki beragam aliran dan sudut pandang. Demokrasi pun dipandang sebagai persoalan pengelolaan kedaulatan rakyat.

Peran oposisi sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa pemerintahan yang berjalan tetap berada dalam kepentingan rakyat dan partisipasi politik, yaitu berkaitan dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri serta menjadi sebuah prasyarat bagi eksistensi demokrasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa akar dari posisi adalah konsep *check and balances* yang artinya bahwa cabang-cabang kekuasaan tidak bekerja semata sesuai dengan kepentingannya. Kontrol dan penyeimbangan memungkinkan pihak-pihak yang ada, baik dalam parlemen maupun eksekutif dapat saling mengendalikan dan mengingatkan jalannya pemerintahan agar tetap sejalan dengan kehendak masyarakat. Selain konsep *check and balances*, konsep pembagian kekuasaan juga penting dalam oposisi. Maksud dari hal ini adalah mengenai hakikat pemangku kekuasaan hanya mewakili satu pandangan tanpa ada kekuatan yang mampu mengimbangi dan mengkritisi.

Dalam sebuah sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan karena terpaku pada satu orang yang sangat berkuasa. Oleh karena itu, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan dalam sebuah negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar TIGA kelompok akar kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol jalannya pemerintahan dan membatasi kekuasaan antar Lembaga, perlu diterapkan prinsip *checks and balances*. Sistem *check and balances* dalam pemerintahan dikembangkan untuk memastikan tidak ada Lembaga dalam pemerintahan yang menjadi terlalu kuat, dan juga pembagian kekuasaan terhadap tiga akar pemerintahan ini juga di harapkan mampu memastikan tiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) terhindar dari adanya kepemilikan kekuasaan yang berlebihan.

Prinsip check and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik - baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadipribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Indonesia pernah mengalami ketidak seimbangan dalam pemerintahan yang menyebabkan kerugian besar dalam negara ini. Ketidak seimbangan ini menyebabkan munculnya berbagai tindak penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Pada saat itu, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kelompok eksekutif yang memiliki kekuasaan yang sangat dominan dan besar dalam berjalannya sebuah negara. Hal ini mengakibatkan lembaga – Lembaga pemerintahan lainnya tidak bisa memaksimalkan fungsinya sebagai salah satu penggerak roda ketatanegaraan karena ‘terkooptasi’ oleh kekuasaan lainnya. Tiga lembaga pemerintahan di Indonesia, eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki peran dan fungsinya masing – masing. Lembaga legislatif seharusnya melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, maka jika ada salah satu Lembaga dengan kekuasaan yang lebih dominan bisa mengakibatkan ketidakseimbangan dan ketidak maksimalan kinerja.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal mengingatkan bahwa pentingnya menghindari adanya kekuasaan negara yang terpusat pada satu kelompok Lembaga tertentu dan perlunya saling control antara satu Lembaga dengan Lembaga lainnya. Bersandingan dengan hal tersebut, perwujudan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan merupakan sebuah hal yang krusial.

Partai Gerindra atau partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat merupakan partai yang sudah di notabene kan sebagai partai oposisi pemerintahan. Keberadaan kelompok oposisi dalam pemerintahan di nilai mampu 'menyehatkan' iklim demokrasi di sebuah negara. Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai Gerindra yang sebelumnya bersaing dengan Presiden terpilih, Joko Widodo, memperlihatkan secara eksplisit persaingan ketat antara oposisi dan koalisi. Hal ini tentu merupakan hal yang baik untuk menyeimbangkan pemerintahan. Meski memiliki peran yang berseberangan, menjadi oposisi dan koalisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan menjadi bagian dari koalisi pemerintah adalah bisa terlibat lebih jauh memengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam dalam kebijakan pemerintah. Sementara itu, oposisi bersifat sebaliknya. Akses dalam mempengaruhi kebijakan secara langsung mungkin terbatas. Namun, pihak oposisi memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Hal ini penting agar *check and balances* parlemen berjalan, maka kehadiran oposisi sangat penting.

Partai Gerindra selama ini telah menjadi simbol partai oposisi di Indonesia, Gerindra yang selama ini terkesan kritis dan ekstrem terhadap Pemerintahan dan juga usai bersaing ketat dengan koalisi memilih bergabung dengan koalisi pasca pesta demokrasi menjadi perdebatan yang hangat. Walau banyak juga publiK yang mendukung langkah ketua umum Gerindra untuk bergabung bekerja sama dengan Pemerintah yang pernah menjadi rivalnya. Namun hal ini dikhawatirkan mampu 'membunuh' kelompok oposisi di Indonesia karena kelompok oposisi dan koalisi tidak seimbang atau berat sebelah

Apabila ditinjau dari ketiga fungsi oposisi terebut langkah-langkah yang diambil oleh Partai Gerindra dan Partai Demokrat telah menyebabkan menurunnya fungsi dan kekuatan dari oposisi yang ada di Indonesia. Dilihat dari fungsi pertamanya, sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah agar memastikan kebijakan yang dibuat pemerintah sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat. Bergabungnya kedua partai besar ini membuat melemahnya peran oposisi, sehingga apabila ada kemungkinan atau dibuatnya suatu kebijakan oleh Presiden para lembaga setingkat eksekutif yang seharusnya mengimbangi atau memberikan kritik atau bahkan menolak putusan tersebut tidak melakukannya dikarenakan berada dalam kubu dan kepentingan yang sama. Hal ini memiliki kemungkinan yang tinggi untuk dapat terjadi, mengingat kursi legislatif pun didominasi dari oleh kubu pemerintah. Berdasarkan peta politik pemilu 2019 Indonesia. Kondisi dari kedua kubu pun saat ini telah berubah. Apabila perubahan tersebut dilihat pada komposisi kursi DPR tentunya, kemungkinan terjadinya kekuatan berlebih sehingga potensi untuk tidak adanya kritik atau masukan yang seimbang pun dapat terjadi.

Pada dasarnya, politik oposisi menjamin demokrasi tetap bekerja dan memastikan monopoli kebenaran tidak boleh terjadi. Kurang efektifnya peran oposisi di Indonesia merupakan hal yang masih sulit terwujud. Oposisi yang diinginkan oleh public lebih pada peran oposisi yang soft seperti menjadi penyeimbang, pengontrol dan mitra kerja pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relative obyektif. Tujuan kontrol politik yakni meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolak ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbarui



dirinya secara terus menerus. Kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik oposisi terhadap kebijakan partai yang memerintah dapat menjatuhkan partai yang berkuasa apabila mosi tidak percaya karena pemerintah sulit memberi penjelasan yang memuaskan terhadap isi kontrol politik oposisi dan mendapatkan dukungan dari parlemen. Tanpa oposisi, demokrasi akan terancam atau mati karena dalam sistem politik demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh bekerja sendiri. Karena kekuasaan itu cenderung bersifat menyimpang.

Kemudian dilihat dari fungsi kedua dari oposisi yaitu untuk memastikan suara dari masyarakat golongan lainnya tersampaikan. Secara polos dan sederhana apabila dilihat berdasarkan kepentingan rakyat yang diwakilkan oleh partai-partai, kepentingan rakyat yang tergabung dan dimuat dalam partai-partai oposisi akan sangat sulit tersampaikan. Dilihat dari perbandingan komposisi kursi DPR partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah di DPR memiliki capaian 481 (terhitung Partai Gerindra dan Partai Demokrat tergabung di dalamnya) kursi sedangkan oposisi hanya memiliki 94 kursi di DPR.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut oposisi yang mewakili kepentingan rakyat pendukungnya memiliki suara dan pengaruh yang lebih kecil, sedangkan hal ini menurunkan tingkat keaktifan dari oposisi. Oposisi yang tidak aktif atau keaktifannya rendah dalam waktu yang lama akan membuat pembusukan demokrasi.

Oleh karena itu, jelas bahwa eksistensi dan penguatan oposisi terkait dengan upaya membuat kebijakan yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan menghindari kekuasaan yang berlebih atau terjadinya oligarki. Oposisi bukanlah sekedar posisi anti-pemerintah atau sekedar berbeda, melainkan sebuah keberadaan yang memberikan kritik dan tawaran sebagai alternatif kebijakan dan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan fungsi yang ketiga yaitu sebagai pesaing dalam mengkontes pemerintah untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini tentunya pihak oposisi dinilai kalah dalam jumlah kekuatan berdasarkan komposisi perannya di pemerintahan. Hal ini tentunya memberikan pengaruh kepada persaingannya dengan kubu pemerintah. Meskipun dalam segi kualitas memberikan pengaruh yang cukup signifikan, kekurangan sumber daya dalam oposisi membuatnya semakin sulit untuk berkontes dengan pemerintah. Oposisi harus lebih bekerja keras untuk membuat dirinya mengimbangi kekuasaan kubu pemerintah.

Dalam menghadapi kondisi politik saat ini, manuver-manuver yang dilakukan oleh partai-partai besar cenderung melemahkan oposisi untuk mengamankan posisinya di pemerintahan. Ditambah lagi dengan diangkatnya Puan Maharani dari PDIP sebagai ketua DPR, dan Bambang Soesatyo dari Partai Golkar sebagai ketua MPR menjadi bukti dari pemerintah telah didominasi oleh kubu tertentu. Kondisi pemerintah kedepannya pun sudah dapat dinilai, yaitu kebijakan yang akan seirama karena berasal dari kubu yang sama. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri akan munculnya rezim yang anti kritik.

Koalisi yang gemuk kali ini menyebabkan pihak oposisi kosong suara karena partai partai yang ada sudah bermanuver ke dalam koalisi, memang di dalam setiap negara demokrasi hal ini lumrah terjadi namun harus tetap mengedepankan check and balance karena dengan begitu demokrasi yang ada dapat berjalan dengan baik dan hal itu adalah nilai yang penting di dalam demokrasi itu sendiri karena harus ada yang tetap menjaga agar tidak keluar jalur yang ada dengan selalu mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai keluar jalur dari jalur yang sudah ada. Koalisi gemuk yang terjadi saat ini juga mengisyaratkan hilangnya rivalitas antara pihak koalisi dan oposisi di dalam dunia perpolitikan Indonesia karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya partai partai besar oposisi mengamankan posisinya masing-masing di dalam pemerintah sekaligus mempersiapkan untuk pertarungan kembali pada event pemilu pada tahun 2024 mendatang dan di negara manapun sikap bermanuver ke dalam pihak yang menang sudah sering terjadi karena untuk mengamankan sektor logistik pada event pertarungan politik

---

<sup>26</sup> Ayomi Amindoni, BBC News Indonesia, Kabinet Jokowi: 'Koalisi Gemuk' Setelah Prabowo Subianto Merapat Ke Pemerintah, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592>,

selanjutnya maka dengan hal itu tidak heran jika banyak partai politik yang melakukan manuver politik demi keberlangsungan kepentingannya.

## **5. KESIMPULAN**

Terdapat tiga bagian penting sebagai poin dari demokrasi untuk mengadakan keseimbangan kekuasaan yang akan berlangsung, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga bagian tersebut memiliki tingkat yang setara dalam melakukan pengawasan satu dan yang lain. Dalam komposisi pemerintahan yang berlangsung tersebut terdapat dua pihak yang saling bersebrangan yaitu pihak pemerintah dan oposisi. Eksistensi dari kedua pihak tersebut sangat diperlukan untuk menjalankan demokrasi di suatu negara. Oposisi yang baik memiliki kekuatan yang hampir setara dengan pemerintah, hal ini ditujukan untuk membuat kritik yang membangun bagi pemerintah, dan menghindari terjadinya penguasa yang bersifat otoriter. Namun, dalam dinamika politik pasca pemilu 2019 di Indonesia beberapa hal yang terjadi justru membuat terjadinya demokrasi yang melemah. Beberapa partai peserta pemilu justru melakukan perubahan sikap setelah mengetahui atau mendapat indikasi bahwa pihak yang mereka dukung mengalami kekalahan.

Perubahan ini dapat dilihat dengan menjelang dikeluarkannya pengumuman hasil suara oleh KPU, yaitu adanya sinyal bahwa Partai Demokrat sebagai salah satu partai besar yang menjadi oposisi menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung ke dalam kubu Jokowi, sedangkan sebagai kontestan dan oposisi terbesar Partai Gerindra bergabung ke dalam koalisi Jokowi setelah dilantiknya ketua umum Partai Gerindra (Prabowo Subianto) menjadi Menteri Pertahanan di dalam kabinet.

Bergabungnya partai besar yang menjadi oposisi ke dalam koalisi pemerintah memberi dampak buruk kepada kondisi demokrasi di Indonesia. Tentunya dalam hal ini kubu pemerintah bermaksud memanfaatkan situasi untuk mendapatkan dukungan dari partai besar oposisinya, saat ini yang terlihat adalah pemerintah berusaha sebanyak-banyaknya mengambil pihak yang berasal dari oposisi untuk melanggengkan kekuasaannya, dukungan dari partai-partai besar bekas oposisi akan membuat pemerintah semakin kuat dalam menggunakan kekuasaannya dalam menentukan kebijakan. Pihak oposisi sebagai pihak yang kalah pun memanfaatkan hal ini untuk mengamankan jabatan dan posisinya dalam pemerintahan. Untuk mendapatkan posisinya dalam pemerintahan partai-partai bekas oposisi tersebut seakan melakukan transaksi jabatan dengan koalisi pemenang pemilu, transaksi disini dapat dilihat dengan indikasi oposisi yang memberi dukungan kepada pemerintah dan masuk koalisi ditukarkan dengan jabatan yang telah ditentukan oleh keduanya.

Tentunya hal ini berdampak langsung bagi partai-partai yang tersisa sebagai oposisi. Penurunan jumlah, aktivitas, dan kualitas oposisi tentunya akan membuat kubu pemerintahan semakin kuat dalam menggunakan kekuasaannya sebagai penentu kebijakan. Pemanang dari pilpres berasal dari kubu petahana, bahkan lembaga setingkat yang seharusnya membagi kekuasaan pun berasal dari kubu yang sama. Dengan kekuatan yang terlalu kuat yang dimiliki pemerintah, hal ini membuat kekhawatiran karena melemahnya oposisi berdampak menurunkan kualitas demokrasi. Kekhawatiran ini akan berujung pada perkiraan dampak terburuk yang akan diterima masyarakat yaitu timbulnya pemerintahan yang cenderung otoriter dan anti kritik, sehingga mampu menghilangkan nilai-nilai demokrasi. Makna demokrasi yang seharusnya kekuasaan berada ditangan rakyatpun dapat berubah menjadi kekuasaan yang mengataskanamakan rakyat.

## **6. DAFTAR REFERENSI**

Asshiddiqie, Jimly. 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*

- Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta).
- Bagus, Lorens. 1986. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Barnard, Fredrick. 1972. *Between Opposition and Political Opposition, The Search of Competitive Politics in Czechoslovakia*, Canadian Journal of Political Science, 533
- Dahl, Robert. 1971. *Poliarchy: Participation and Opposition*. London: New Haven, CT, and London: Yale University Press.
- Noor, Firman. 2016. *Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019, diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/27/10250341/ini-urutan-penghitungan-suara-pada-pemilu-serentak-2019>
- CNN Indonesia, KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019>
- Ayomi Amindoni, BBC News Indonesia, Kabinet Jokowi: 'Koalisi Gemuk' Setelah Prabowo Subianto Merapat Ke Pemerintah, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592>,
- Ihsannudin, Kompas.com, "SBY Temui Presiden Jokowi di Istana", diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/14134601/sby-temui-presiden-jokowi-di-istana>.
- TEMPO.CO, Sinyal Gerindra-Demokrat ke Jokowi Kian Terang Jelang Pelantikan, diakses melalui: <https://nasional.tempo.co/read/1258797/sinyal-gerindra-demokrat-ke-jokowi-kian-terang-jelang-pelantikan/full&view=ok>
- CNBC Indonesia, 'Menteri kabinet jokowi jilid ii', <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023102611-4-109306/sah-ini-menteri-kabinet-jokowi-jilid-ii-kuy-intip-profilnya/2>
- 'bergabungnya gerindra ke pemerintah merupakan kerugian besar', <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/14/bergabungnya-gerindra-ke-pemerintah-merupakan-kerugian-besar>
- Ayomi Amindoni, BBC News Indonesia, Kabinet Jokowi: 'Koalisi Gemuk' Setelah Prabowo Subianto Merapat Ke Pemerintah, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?, diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592>